



DARI SWISS KE IRAN: “DALAM UPAYA MENDUKUNG GERAKAN SOSIAL PEMENUHAN HAM BAGI PEREMPUAN IRAN MELALUI NON GOVERNMENT ORGANIZATION SWISS”

Mutiara Agustin Br. Haloho, Reni Windiani, Ika Riswanti Putranti

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

The struggle for equal rights for women existed before the Islamic Revolution. To ensure that there are gender interests which are important in fulfilling the Sustainable Development Goals (SDGs) in social life. This study is seek to answer the actions of Iranian women as a society that has the same position and status and is able to contribute in the political field and women's participation to be able to participate in the political field and which is supported by Swiss women's institutions to elevate the role of women in Iran after the revolution through Non-Government Organization. This study uses the theory of Liberal Feminism which is one of the theories of International Relations in supporting the fulfillment of human rights for women. The results of the study show that the presence of Switzerland encourages the fulfillment of human rights for Iranian women. Switzerland has been present in Iran for 40 years and is a country of communication between the US and Iran together by supporting the fulfillment of Iranian women's human rights through NGOs and the existence of CEDAW as a convention on women's human rights, there is still a gap in human rights between men and women in Iran.

Keywords: *Non-Government Organisation, Swiss, Women, Human Right, Feminisme,*

PENDAHULUAN

Peristiwa revolusi yang terjadi di kehidupan sejarah Iran memberikan pengaruh yang sangat besar bagi Iran terhadap perubahan sistem pemerintahan politik dari Monarki menjadi Republik Islam Iran. Pasca Revolusi, Iran membawa perubahan dalam memandang hak bagi perempuan Iran. Kehadiran konstitusi Iran 1979 membuat adanya pembatasan aktivitas perempuan Iran setelah menikmati masa kepemimpinan Rezim Pahlevi yang mengadopsi liberalisme barat. Peralihan hukum yang berlaku membuat perempuan di Iran sering melakukan demonstrasi karena perilaku pemerintah dianggap oleh masyarakat Iran tidak sesuai dengan hukum yang ditetapkan, sehingga perempuan sangat mengalami keterbatasan dalam berekspresi di bidang pendidikan, busana, politik, seni hingga di publik. Aktivitas pemerintah Iran dalam menanggapi aksi demonstrasi perempuan di Iran juga menjadi perhatian khusus bagi dunia internasional, khususnya terhadap hukum yang berlaku dan polisi moral Iran yang sering dianggap melakukan penculikan, penangkapan, penghukuman hingga pembunuhan yang merebut hak asasi manusia (Mikkail, 2015).

Situasi ini membuat masyarakat mulai turun ke jalan untuk memberikan hak suara dan melakukan demonstrasi yang dipicu dengan adanya skandal politik yang terjadi di Iran. Koruptif, despotis, dan pemerintahan diktator seakan-akan sangat melekat bagi pemerintahan

Iran. Hal ini pula yang menyebabkan Iran melakukan pembatasan gerakan bagi kaum perempuan, meskipun dalam sistem demokrasi yang ditetapkannya, Iran mengakui telah melakukan pembuatan kebijakan untuk menyetarakan pemenuhan hak laki-laki dan wanita. Permasalahan gender menjadi sangat unik untuk diteliti, dikarenakan permasalahan ini kerap terjadi di hampir di seluruh negara, dan keberadaan perempuan selalu akan menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan dalam pembahasan dunia politik dan pemenuhan hak asasi manusia.

Menjadi negara dan menganut mayoritas agama Islam, membuat Iran melekatkan budaya kolonialisme yang masih sangat sering terjadi dan begitu kuat pada masa Syah Reza Pahlevi. Sering ditemui benturan antara masyarakat dengan pemerintah Iran, menjadikan Iran sangat sering di *mention* dalam setiap pertemuan untuk membahas perlindungan hak asasi manusia para kaum perempuan di Iran. Sebagai negara Republik Islam Iran, telah menonjolkan sisi ke-Islaman yang melekat hingga membuat perundang-undangan yang dijiwai dalam unsur keislaman dan menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, merupakan hasil elaborasi dari gagasan *wilayatul faqih* yang membuat pelaksanaan pemerintahan Iran dibagi dalam tiga bagian kekuasaan atau yang dikenal dengan istilah trias politika yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kehadiran konstitusi Iran 1979 membuat adanya pembatasan aktivitas perempuan Iran setelah menikmati masa kepemimpinan Rezim Pahlevi yang mengadopsi liberalisme barat. Peralihan hukum yang berlaku membuat perempuan di Iran sering melakukan demonstrasi karena perilaku pemerintah dianggap oleh masyarakat Iran tidak sesuai dengan hukum yang ditetapkan, sehingga perempuan sangat mengalami keterbatasan dalam berekspresi di bidang pendidikan, busana, politik, seni hingga di publik. Kehadiran Duham (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) merupakan awal dunia internasional semakin memperhatikan hak perempuan dengan kodifikasi dan standar yang ditetapkan bersama. *The UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women - CEDAW* merupakan konvensi yang dibentuk dalam konferensi PBB, pembentukan ini dilakukan pada tahun 1979 dan berlaku pada tahun 1981 (Weddyono, 2014).

Swiss menjadi negara yang ikut kontribusi terhadap Iran dalam upaya memenuhi Hak Asasi Manusia bagi perempuan Iran melalui komunitas perempuan, *Non-Government Organization* ataupun *Non-Profit Organization*. Organisasi Perempuan Swiss berkomitmen untuk dapat berpartisipasi dan mendukung perempuan dalam pembangunan perdamaian, khususnya perempuan yang kurang beruntung dan terpinggirkan di Iran. Kehadiran NGO Swiss dilakukan dengan menyalurkan bantuan melalui aktivis perdamaian, pendidikan, fashion hingga mempengaruhi hukum yang berlaku. Adanya peran yang dilakukan oleh Komunitas Perempuan Swiss terhadap Perempuan Iran, memperlihatkan bahwa Swiss hingga saat ini masih menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan Iran (FDFA, 2020).

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini menggunakan teori Feminisme Liberal, Konsep CEDAW dan Gerakan NGO's Swiss dalam pemenuhan HAM. Relevansi antara teori feminisme liberal dan konsep digunakan dalam melihat bagaimana penanganan pemenuhan Hak Asasi Perempuan di Iran melalui kehadiran *Non-Government Organisation*. Feminisme liberal adalah suatu bentuk feminisme yang mengedepankan adanya hak-hak perempuan, yang dapat diterima melalui jalur hukum dan perbaikan-perbaikan di bidang sosial, dan bahwa hak-hak perempuan dapat diwujudkan manakala perempuan setara dengan laki-laki. Dalam feminisme liberal terdapat pandangan yang memberikan kebebasan penuh dan individual kepada perempuan. Kecenderungan ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesetaraan didasarkan pada rasionalitas dan pemisahan dunia privat dan publik.

Penelitian ini juga menggunakan konsep dari "The Convention on the Elimination of ALL Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yaitu instrumen hukum internasional yang mewajibkan negara-negara menghapus tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di semua bidang dan mempromosikan persamaan hak perempuan dan anak perempuan. CEDAW merupakan undang-undang internasional tentang hak perempuan dan merupakan salah satu kesepakatan internasional utama yang memandu pekerjaan UN Women dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Tidak hanya untuk perempuan, CEDAW for Youth juga merupakan CEDAW bagi remaja yang ditulis oleh wanita dan pria muda. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana Negara negara konvensi sepakat untuk memenuhinya (Eddyono, 2004).

METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif untuk menguraikan atau mengungkapkan metode penulisan. Metode kualitatif merupakan metode yang berusaha menyusun, menginterpretasikan dan mengumpulkan data yang kemudian diajukan dengan menganalisis data tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan metode deskriptif yang meneliti suatu kondisi, sistem pemikiran, suatu objek dan suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan data yang didapat melalui Women's Human Rights dan CEDAW sebagai acuan untuk melakukan metode penelitian berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh UN Human Rights women's rights dan CEDAW.

PEMBAHASAN

DINAMIKA POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN IRAN

Sebelum menjadi Negara Republik Islam, dahulu Iran memiliki bentuk sistem pemerintahan monarki yang dipimpin oleh Reza Khan (Reza Shah Pahlevi), sebelum terjadinya Revolusi Islam rezim Pahlevi yang cukup lama yaitu 54 tahun dari tahun 1925 hingga 1979. Kehadiran dan adanya hubungan dengan pihak Barat, membuat rezim ini pada akhirnya tidak bertahan lama dan dijatuhkan oleh rakyat Iran dan kebijakan yang dibuat oleh rezim Pahlevi justru membuat Iran semakin diintervensi oleh negara barat. Kehadiran kepemimpinan Reza Pahlevi II tidak serta merta membawa kedamaian bagi warga Iran, hal ini justru membuat semakin banyak pertentangan dengan perdana menteri yang telah diangkat dan berbagai kalangan yang telah bergabung dalam Front Nasional pada kepemimpinan Mossadeq. Situasi tersebut menghadirkan demonstrasi yang dilakukan oleh warga Iran melawan rezim Pahlevi dimulai pada bulan Oktober 1977 dan berkembang menjadi bentuk kampanye perlawanan masyarakat terutama kaum ulama terhadap rezim Reza Pahlevi.

Dalam pergerakan ini, tidak hanya kaum pria saja yang ikut mengambil andil, namun kaum perempuan pun terlibat dalam gerakan revolusi konstitusi dan membawa perubahan besar terhadap kontribusi perempuan terhadap politik massa. Kehadiran Imperialisme Barat ke Iran memberikan ruang bagi perempuan untuk dapat berartikulasi ide-ide baru tentang perempuan dan menciptakan kesempatan bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam bidang politik dan memfasilitasi pembentukan gerakan wanita di Iran. Perempuan juga berupaya untuk bergabung dalam konstitusi dan pertemuan tradisional sosial hingga pertemuan politik.

Dengan Imperialisme Barat, perempuan mulai belajar mengenai peristiwa politik terbaru. Pergerakan perempuan dalam dunia politik belum dapat bebas, sehingga perempuan melakukan pembahasan diskusi politik dalam kelompok rahasia dan kegiatan kontribusi awal politik perempuan Iran dimulai dengan menyebarkan berita dari informasi yang beredar, berpartisipasi dalam demonstrasi, mulai mengangkat senjata untuk protes dan dapat bertindak sebagai informan dan menjadi utusan (Paidar,1997).

Kehadiran modernitas yang dibangun sebelum pemerintahan Pahlevi dan setelahnya memberikan pengaruh besar bagi kaum perempuan Iran, perubahan yang baik mulai menghadiri di kehidupan kaum perempuan Iran. Awalnya mereka masih buta huruf dan terbatas dalam memberikan pendapat, mulai berani untuk unjuk rasa dan menuntut keadilan dan kesetaraan dalam berbagai bidang. Peran perempuan yang awalnya hanya berada dibawah tekanan laki-laki, mulai berani keluar dan menunjukkan bahwa mereka layak untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki terutama dalam hal pendidikan, sosial, budaya, politik dan berpendapat bebas.

PEREMPUAN DALAM SISTEM DEMOKARASI IRAN

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang terdiri dari kata *demos* dan *kratos* (*kratein*) yang berarti rakyat dan kekuasaan atau berkuasa. Sehingga arti

demokrasi adalah “rakyat berkuasa” atau disebut dengan pemerintahan oleh rakyat, dan kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat (Budiarjo, 1998).

Pada perspektif barat, menurut Robert A. Dahl dalam bukunya *Democratic and Its Critics*, merupakan sarana untuk mencapai persamaan politik dengan mencakup tiga hal yaitu kebebasan manusia (baik secara individu maupun kolektif), perlindungan terhadap nilai (harkat dan martabat), kemanusiaan, dan perkembangan terhadap diri manusia. Menurutnya, demokrasi memiliki nilai-nilai yaitu persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat, terdapat kesepakatan yang sama bagi semua warga negara, pembenaran kebenaran, kontrol terhadap agenda dan pencakupan terhadap masyarakat yang mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum (Syamsuddin, 1995).

Dalam perspektif Islam, pemahaman tentang ajaran Islam sendiri diwarnai oleh perbedaan pemikiran para kaum ulama, dengan kata lain Islam akan dipahami dengan perspektif yang berbeda. Secara literal, demokrasi dalam perspektif Islam merupakan kekuasaan oleh rakyat, yang dalam doktrin Islam yang berbeda dan menganut doktrin kedaulatan di tangan Tuhan. Secara prinsipal, doktrin Islam yang berkenaan demokrasi adalah doktrin politik (Islam) yang holistik dan universal. Pemikiran para politik Islam kontemporer mengabaikan konsep sistem demokrasi.

Pada awal-awal setelah revolusi Iran, wanita diwajibkan untuk mengenakan cadar dan terikat oleh nilai-nilai Islam. Seiring berjalannya waktu, dengan sistem demonstrasi, masyarakat Iran mulai menyuarakan untuk tidak ingin dalam penggunaan cadar. Kebijakan penghapusan penggunaan cadar dan jilbab sempat dihapus beberapa saat, namun hukum penggunaan cadar kembali lagi. Tahun 1990-an perempuan mulai mengikuti pemilihan untuk menjadi anggota parlemen dan berupaya dalam memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan wanita. Adanya amandemen dan undang-undang terkait perceraian dan warisan mengatur hak yang sama dan dengan kehadiran *Non Government Organisation* menjadi alasan bagi wanita untuk dapat bergabung di parlemen.

TABEL 1. KEBEBASAN DEMOKRASI IRAN 2021

FREEDOM IN THE WORLD 2021	
IRAN NOT FREE	16/100
Political Rights	6/40
Civil Liberties	10/60
LAST YEAR'S SCORE & STATUS	17/100 Not Free

Freedom in The World 2021(Sumber:<https://freedomhouse.org>)

TABEL 2. KEBEBASAN DEMOKRASI IRAN 2022

FREEDOM IN THE WORLD 2022	
IRAN NOT FREE	14/100
Political Rights	4/40
Civil Liberties	10/60
LAST YEAR'S SCORE & STATUS	16/100 Not Free

Freedom in The World 2022 (Sumber: <https://freedomhouse.org/>)

Sistem pemilu di Iran juga tidak memenuhi standar demokrasi Internasional sehingga hak kebebasan yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat menurut data dari *Freedom in The World* memperoleh skor 16 dari sebelumnya 17 dari 100 dan sangat rendah, masyarakat tidak memperoleh kebebasan dalam sistem demokrasi. Masih pada posisi *Not Free* terhadap kebebasan masyarakat Iran, *Freedom in The World* menetapkan skor 14 kepada Iran yang mana skor ini lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sistem demokrasi Islam seakan tidak berdampak bagi masyarakat Iran. Dalam pemerintahan Iran, hanya partai politik dan faksi yang setia pada pendirian dan ideologi negara saja yang diizinkan beroperasi. Sistem Demokrasi Republik Iran membatasi kebebasan bergerak terutama bagi perempuan yang dianggap sebagai penentang rezim. Banyak aktivis dicegah meninggalkan Iran. Wanita juga dilarang untuk berada di tempat umum tertentu dan harus menggunakan paspor untuk bepergian ke luar negeri hanya dengan izin keluarga atau suaminya. Pembatasan akan kebebasan sosial juga terjadi di Iran, semua penduduk terutama wanita, harus tunduk pada aturan wajib tentang pakaian dan penampilan pribadi dan mereka yang dianggap telah melakukan pelanggaran aturan akan dikenakan denda dan penangkapan negara.

**Tabel 3. The Democracy Index of Iran
World Ranking**

Civil Liberties	6 Score 1 Most Free, 7=Least Free in 2018	FH
Corruption Perceptions Index	25 Score 100= "Very Clean" in 2022	TI
Ease of Doing Business	56.98 Score in 2019	WB
Freedom	18 Score, 0= Least Free, 10= Most free in 2018	FH + 1 other

Global Competitiveness	52.97 0-100 in 2019	WEF
Global Peace Index	2.64 Score, Lowest = Best in 2021	IEP
Human Development Index	0.77 Index in 2021	UNDP
Political Rights	6 score 1= Most Free, 7=Least Free	FH
Press Freedom Index	136.6 score 0=Complete Freedom, 100=No Freedom at all in 2012	RSF
International Property Index	3.64 score 10= Highest property rights 0= Lowest Property Rights in 2022	PRA
Knowledge Economy Index	3.91 index 0= Lowest, 10=Highest in 2012	WB
Legatum Prosperity Index	108 Rank	Legatum Institute

The democracy index of Iran (Source: <https://knoema.com/data/iran+democracy-index>)

Pada data yang dihimpun dari Knoema, sistem demokrasi Republik yang diterapkan dalam Iran memiliki nilai yang sangat rendah, terutama dalam bidang kebebasan yang memperoleh skor 18, angka ini menunjukkan pada tahun 2018, Iran masih belum memberikan kebebasan kepada rakyat Iran. Pada hak untuk politik, tidak dibuka untuk masyarakat yang mampu namun masih terdapat unsur nepotisme. Perempuan juga mendapatkan pembatasan pada hak politik. Tidak hanya itu, data tersebut juga menyampaikan bahwa kebebasan pers di Iran samasekali tidak karena dianggap penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian kepada pemerintah sehingga informasi hanya diperoleh dari pemerintah saja.

Gerakan Ngo di Iran

Kehadiran NGO (*Non-Government Organisation*) di Iran terdiri dari LSM yang bersifat formal dan informal. Beberapa LSM yang hadir di Iran, tidak terdaftar secara resmi di Kementerian Dalam Negeri, dan yang lainnya melakukan proses pendaftaran resmi di kementerian dan berkomitmen untuk mengikuti peraturan LSM. Pada dasarnya pemerintah membuat peraturan, untuk mengikat LSM dan membatasi tujuan mereka pada pekerjaan non profit dan non politik. Kehadiran LSM/NGO tidak boleh terlibat dalam segala bentuk aktivitas sosial atau politik yang menantang, atau dapat ditafsirkan menentang kebijakan negara (Katirai 2005). LSM yang tidak mendaftar secara formal di Iran akan lebih cenderung mendapatkan isu-isu yang kontroversial dan menjadi sasaran pasukan keamanan. Salah satu LSM, kelompok feminis Bidarzani di Iran, tidak mendaftarkan komunitasnya secara formal karena dianggap akan mengekang kelompok tersebut. Dengan tidak didaftarkan secara formal, kelompok feminis Bidarzani berani untuk membicarakan topik-topik tabu yang menentang pemerintah, seperti menentang kekerasan dalam rumah tangga Iran, perubahan

budaya dan memprotes hukum patriarki. Sehingga, Bidarzani beroperasi dalam keadaan sulit dan anggotanya menjadi sasaran pasukan keamanan, sehingga Bidarzani tidak dapat bertahan lama menjadi sebuah kelompok feminisme. Disisi lain, LSM yang terdaftar secara formal lebih dibatasi dalam hal isu yang dapat mereka bicarakan dan ruang lingkup pekerjaan sehingga memiliki resiko yang lebih kecil. Namun, dengan terdaftar secara formal, membuat kelompok LSM dapat menikmati kebebasan yang lebih besar dari gangguan pemerintah dan akses yang lebih baik ke sumber daya.

Setelah Revolusi Islam, LSM Perempuan difokuskan sebagai penyedia layanan dan mempromosikan peran perempuan di ruang publik dengan dalam kerangka Islam yang baru dilembagakan. Konstitusi Republik Islam Iran mencakup klausul tentang hak dan kebebasan individu, dan mengakui kesetaraan antara pria dan wanita sesuai dengan 'kriteria Islam'. Bagaimana tepatnya kriteria tersebut ditafsirkan dan diterapkan terbukti sangat bermasalah bagi perempuan. Hingga pada awal Republik Islam, masih sedikit LSM perempuan yang muncul dan hanya berfokus pada pekerjaan berbasis amal apolitis (Khosravi dan Shahsavari Fard 2016, 195). Dalam data dari Kementerian Dalam Negeri Iran, terjadi peningkatan jumlah LSM Perempuan yang meningkat dalam 10 tahun dari 13 LSM menjadi 158 LSM yang terdaftar dan 92 LSM tidak terdaftar pada tahun 2000 (Saeidi, 2005).

LSM Perempuan mengambil peran yang lebih aktif dalam menangani kebutuhan masyarakat dan perempuan dan mengalihkan kegiatan amal menjadi penyedia layanan advokasi hak perempuan dan berkontribusi pada reformasi penting terkait pernikahan, perceraian, hak asuh dan hak perempuan untuk bekerja sebagai hakim.

Kehadiran Swiss di Iran

Secara global, kemerosotan kehidupan perempuan sering dikaitkan dengan keamanan yang memburuk pada sebuah negara, terutama dalam akses layanan yang diberikan kepada perempuan. Kehadiran Swiss di Iran dimulai ketika AS dan Iran yang telah melakukan putus hubungan komunikasi dan diplomatik. Swiss memegang lima mandat kekuatan perlindungan yang berhubungan dengan Iran, termasuk AS yang telah dipegang selama lebih dari 40 tahun. Melalui mandat ini, Swiss menyediakan saluran rahasia yang memungkinkan dua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik untuk tetap dapat berkomunikasi satu sama lain.

Dengan ini, Swiss mulai memiliki peran yang aktif di Iran, dan Swiss menyadari kehadirannya sebagai pihak ketiga dalam komunikasi Iran-AS dapat memberikan perlindungan konsuler bagi warga negara pengirim di negara penerima. Kepercayaan Iran dan AS kepada Swiss memberikan Swiss akses reguler ke perwakilan berpangkat tinggi dari kedua negara tersebut. Sehingga diplomat Swiss dapat menggunakan akses ini untuk tujuan lain yaitu memberikan perlindungan bagi perempuan Iran dan keprihatinan terkait situasi hak asasi manusia di Iran.

Swiss merupakan negara yang aman bagi perempuan yang dikemukakan oleh Women, Peace and Security Index External. Swiss dikenal menjadi negara yang baik dan aman di bidang keamanan, karena wanita Swiss dilaporkan memiliki rasa aman di depan

umum dan negara tersebut mencatat rendah dari kekerasan keluarga maupun pasangan. Dengan menempatkan swiss yang selama ini mempromosikan kesetaraan bagi perempuan di rumah dan tempat perempuan (Laporan OECD), membuat Swiss dikenal sebagai negara yang aman dan terbaik untuk hak-hak perempuan.

Swiss merupakan negara yang ditunjuk sebagai duta besar wanita pertama untuk Iran sejak revolusi Islam 1979. Swiss sangat menentang adanya kegiatan diskriminasi yang berbasis gender, perilaku yang tidak baik diberikan kepada termasuk sunat perempuan, hak reproduksi, kesenjangan upah dan kekerasan seksual. Hal ini dapat merugikan hak kaum perempuan dan juga negara yang menentang hak bagi perempuan. Dengan dikenal sebagai negara yang memiliki skor diskriminasi yang sangat rendah berkat undang-undang dan norma sosial di Swiss, negara Swiss berupaya untuk berkontribusi di negara lain dalam menciptakan perdamaian bagi seluruh wanita didunia dengan menggunakan *non-government organisation* ataupun *non-profit organisation*.

Ditunjuk sebagai *first female ambassador to Iran* sejak revolusi 1979, menjadikan Swiss berupaya dalam meningkatkan hubungan dengan Iran meskipun harus melewati beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Swiss. Namun dengan upaya yang dilakukan Swiss dalam mendukung hak asasi perempuan di Iran menuai kritik dari politisi konservatif Swiss dan permohonan solidaritas dari aktivis hak-hak perempuan. Masalah hak asasi manusia menjadi agenda upaya penting yang dilakukan Swiss untuk mewujudkan hak asasi manusia di Iran dengan mengandalkan kerjasama dengan organisasi internasional dalam pekerjaan hak asasi manusia di Iran. Swiss mendukung proyek UNICEF untuk Hak Asasi Manusia di bidang peradilan anak di Iran.

Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan akses keadilan anak dibawah umur termasuk anak perempuan dan memberlakukan moratorium penggunaan hukuman mati bagi orang yang masih di bawah umur ketika pelanggaran dilakukan. Kedutaan Besar Swiss di Iran juga mendukung proyek-proyek LSM di bidang pembangunan, bantuan kemanusiaan dan keamanan manusia yang bermanfaat bagi Iran. Masalah mengenai hak asasi manusia diatur menjadi agenda pertemuan bilateral tingkat tinggi antara Iran dan Swiss dan direncanakan dilakukan setiap awal tahun. Adanya pertemuan ini membuat Iran menyatakan minatnya untuk melanjutkan dialog dengan Swiss akan komitmennya terhadap hak asasi manusia di Iran.

Peace Women Across the Globe (PWAG)

Peace Women Across the Globe merupakan organisasi perdamaian feminis yang aktif secara internasional yang berlokasi di Bern, Swiss. Kehadiran Peace Women Across the Globe merupakan jaringan relawan aktivis damai perempuan yang bergerak dalam bidang HAM, gender dan feminisme yang berjuang untuk perdamaian dan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi perempuan dengan cara mempromosikan kepemimpinan perempuan. PWAG di inisiatif oleh ide yang berani visioner untuk menominasikan 1000 wanita untuk Hadiah

Nobel perdamaian yang memberikan lebih banyak aktivitas perdamaian wanita yang dimulai dari tahun 2003.

PWAG berada pada negara-negara yang berkonflik dan setiap tahun memberikan perubahan bagi perempuan-perempuan di negara global. Tahun 2008, Peace Women Across the Globe menetapkan prioritasnya dengan program "Redefining Peace-Women Lead the Way" yaitu partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, transformasi konflik dan pembangunan perdamaian serta jaringan aktivis perempuan dan keterlibatan pada keadilan gender. PWAG aktif dalam tiga bidang yaitu; *Peacebuilding, Network and Political Network*.

a. Peacebuilding

Berupaya untuk membangun perempuan untuk tidak terpengaruh dengan konflik bersenjata, kerapuhan politik dan kekerasan. Namun, saat ini pengetahuan perempuan perlu ditingkatkan. PWAG berkomitmen untuk dapat memastikan bahwa perempuan, terutama perempuan yang terpinggirkan, memiliki suara yang setara dalam membentuk proses transformasi perdamaian dan konflik yang terjadi di negara mereka.

b. Network

PWAG berupaya untuk membentuk jaringan dan pembelajaran bersama serta platform untuk membawa tuntutan kebijakan perdamaian feminis kepada publik. PWAG juga akan membentuk jaringan *Feminists Connecting for Peace* untuk membentuk wanita dalam memperoleh perdamaian dan HAM.

c. Political Work

Tidak bekerja dengan sendir, PWAG juga bekerja sama dengan mitra masyarakat sipil, baik di Swiss maupun dunia internasional secara aktif dan politik. PWAG memiliki advokasi yang berfokus terhadap partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan transformasi konflik, hak-hak perempuan dan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia yang penting.

PWAG melakukan aksi seruan untuk solidaritas dan tindakan nyata di Iran. Perempuan adalah pemicu dan kekuatan pendorong di balik gelombang protes yang terjadi di Iran dan telah melanda negara Iran pasca revolusi dan kembali muncul ke permukaan global sejak kematian Masha Amini yang kejam dan telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran. PWAG bersuara siap berdiri dalam solidaritas dengan para wanita yang memprotes dan menyerukan kepada organisasi masyarakat sipil, pemerintah dan komunitas internasional untuk mendukung ekspresi solidaritas para wanita di Iran dengan tindakan nyata.

CEDAW dan Kondisi Perempuan Iran

CEDAW merupakan suatu kesepakatan Hak Asasi Internasional lahir dari pengalaman diskriminasi terhadap perempuan di berbagai belahan dunia yang disusun secara khusus untuk mengatur hak-hak perempuan dan perlindungan bagi perempuan yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979. Konvensi ini menyusun mengenai prinsip-

prinsip tentang hak asasi manusia, norma-norma dan standar kelakuan dan kewajiban dimana negara yang meratifikasi konvensi tersebut sepakat untuk memenuhinya. CEDAW juga ditetapkan sebagai perlindungan bagi secara internasional bagi perempuan di seluruh dunia

Menurut indeks Kesenjangan Gender, Iran memiliki skor terendah untuk pemberdayaan politik perempuan yaitu 3,6% dari jumlah penduduk. Mulai tahun 1980-an kebijakan sangat mempengaruhi gerakan perempuan yang mulai menyimpang, terutama sehubungan dengan sikap lingkungan terhadap Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). CEDAW yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979, meminta negara anggota untuk memasukkan kesetaraan gender dalam pembuatan kebijakan, namun hal ini tidak berlaku di Iran, dan menolak perempuan di Iran dalam pembangunan politik selama 3 dekade. Meskipun merupakan rezim baru, Iran diundang untuk menandatangani CEDAW, namun ditolak.

Alasan yang mendasari Iran dalam menolak penandatanganan adalah dampak perang yang terjadi dengan Irak selama delapan tahun dan berdampak terhadap ekonomi dan infrastruktur pada tahun 1980-an menjadikan peningkatan ekonomi adalah hal yang prioritas bagi Iran. Penindasan pasca revolusioner terhadap aktivis sekuler dan progresif juga mengandung tekanan internal untuk mengakui hak perempuan. Pergoolakan ini secara signifikan jelas memperlihatkan penundaan pertumbuhan aktivisme perempuan dan menyerukan perubahan progresif. Dua dekade setelah revolusi Islam, gerakan yang mendukung hak-hak perempuan di Iran mengalami kebangkitan. Perempuan membuat tuntutan dan bersuara melalui majalah-majalah perempuan dan sangat berkembang seperti *Women magazine, Hajar's Message and Women's Rights*.

Dengan terbukanya ruang politik bagi perempuan Iran pada awal kepresidenan Khatami pada tahun 1997, memicu terjadinya gerakan reformasi dan mampu memperkuat masyarakat sipil Iran dan memberikan panggung politik bagi anggota perempuan Iran sehingga memiliki kesempatan dalam memprioritaskan pemberdayaan perempuan di kementerian dan mengubah kebijakan yang menghambat perempuan. Meskipun upaya ini memberikan peluang bagi perempuan dalam posisi di politik tidak ada perubahan formal yang dilakukan untuk meningkatkan inklusi politik perempuan. Parlemen menerapkan CEDAW pada Mei 2003, namun Iran tidak meratifikasi CEDAW karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

Dengan berakhirnya era reformasi, aktivitas masyarakat sipil Iran dibatasi oleh lembaga keamanan dan faksi konservatif yang berkuasa, mereka mengharapkan perempuan untuk berperilaku sesuai dengan peran “tradisional” yang diterapkan oleh para Ulama di Iran menjadi organisasi yang berbasis politik dan keagamaan perempuan yang paling berpengaruh di Iran, *Zeinab Society* melobi partai-partai konservatif untuk menggunakan pembacaan agama yang ramah perempuan dan bersekutu dengan perempuan reformis yang menghasilkan kesempatan menjabat sebagai menteri kesehatan tahun 2009 hingga 2013 oleh Marzieh Vahid. Namun, sangat disayangkan, tidak ada perubahan signifikan yang

terjadi lagi dan saat ini hanya terdapat kurang dari 6% parlemen di Iran adalah perempuan dan tidak ada kabinet yang diusulkan juga menteri perempuan yang memimpin dalam pemerintahan Rouhani.

Perlindungan perempuan Iran

Pelanggaran dan kejahatan terhadap perempuan patut mendapatkan perhatian khusus karena mempengaruhi kehidupan manusia yang seharusnya memiliki kebebasan dan keamanan. Pelanggaran HAM yang terjadi di Iran masih sangat meluas hingga saat ini. Ratusan wanita Iran dilaporkan dibunuh setiap tahun dalam pembunuhan demi kehormatan (Peterson, 2020).

Pada tahun 2019 hampir tercatat 30 persen pembunuhan wanita di Iran ditemukan sebagai pembunuhan demi kehormatan terhadap wanita dan anak perempuan (Fassihi, 2020).

Kehadiran CEDAW melindungi perempuan di belahan dunia dan diakui oleh Majelis Umum PBB sebagai piagam internasional hak-hak perempuan. Iran, anggota PBB, belum meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena CEDAW tidak sejalan dengan hukum Islam. Presiden Khatami mengesahkan legislasi untuk mendukung CEDAW tetapi tidak meratifikasi konvensi tersebut. Sebagai anggota PBB, Iran harus mendukung tujuan utama PBB, yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia tanpa diskriminasi berdasarkan gender dan kebebasan perempuan.

Ada banyak pelanggaran HAM Perempuan yang terjadi di Iran dan melanggar aturan yang ditetapkan dalam CEDAW dan aturan Iran yang bertentangan dengan aturan CEDAW, diantaranya:

1. Poligami

Dalam hukum Islam perkawinan, tidak adanya larangan bagi laki-laki untuk melakukan poligami secara mutlak (haram) dan juga tidak menganjurkan untuk melakukan secara wajib. Poligami dipraktekkan hanya jika seorang laki-laki mengikuti hukum Islam untuk berlaku adil dan bermanfaat bagi keluarga, dan jika tidak memungkinkan, Islam hanya merekomendasikan satu istri. Dalam UU Perlindungan Keluarga Pasal 16 tahun 1968 dan 1975, poligami dilarang karena laki-laki yang hendak melakukan poligami harus mendapat izin dari pengadilan. Dalam Pasal 16 Undang-undang Perlindungan Keluarga Iran, seorang pria hanya diperbolehkan menikah dalam keadaan tertentu dan jika dia mendapat persetujuan dari istri pertama, istri pertama tidak mampu melakukannya. kewajiban perkawinan, keyakinan istri, istri menderita demensia atau masalah lainnya. Penyakit yang tak disembuhkan, kemandulan, kehilangan istri.

2. Kejahatan demi Kehormatan

Tertulis dalam Pasal 640 KUHP Iran “Ketika seorang pria melihat istrinya melakukan zina dengan pria lain, asalkan dia yakin bahwa istrinya bersedia (berhubungan seks), dia dapat membunuh keduanya, mereka berada di posisi yang

sama. Namun apabila jika dia tahu bahwa istrinya berada di bawah paksaan, dia hanya boleh untuk membunuh laki-laki (yaitu pemerkosanya).” Dalam pasal ini memperlihatkan bahwa Iran memperbolehkan *Honor Killing* untuk menjaga kehormatan keluarga. Tingginya angka pembunuhan demi kehormatan di Iran sebanyak 8.000 pembunuhan antara tahun 2010 dan 2014.

Dalam ajaran Islam, membunuh tanpa haq merupakan dosa besar seperti tertulis dalam Al Quran *“Dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allâh murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya.”* Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, “Pembunuhan dengan satu dari tiga perkara ini disepakati di antara kaum Muslimin (âmi’ul-‘Ulûm wal-Hikam, 2/16) yaitu (1) satu jiwa (halal dibunuh) dengan (sebab membunuh) jiwa yang lain, (2) orang yang sudah menikah yang berzina, (3) orang yang keluar dari agamanya (Islam) dan meninggalkan jama’ah (Muslimin), akan tetapi yang perlu diketahui bahwa yang berhak dan berkewajiban melaksanakan pembunuhan yang haq ini hanya penguasa kaum Muslimin, bukan hak individu atau masyarakat, karena hal itu akan menyebabkan kekacauan. (HR Bukhari, no. 6484; dan Muslim, no. 1676).

3. Usia minimal untuk menikah

Dalam Undang-Undang Iran No.2 Tahun 2002 yang telah diamandemen, usia minimal pernikahan adalah 15 tahun untuk anak perempuan dan 18 tahun untuk anak laki-laki. Seorang anak juga dapat dinikahkan oleh ayah ataupun kakek dari pihak ayah sebelum usia yang sah atau sesuai undang-undang yang ditetapkan untuk menikah. Menurut pasal 1041 KUH Perdata, apabila perkawinan anak perempuan belum mencapai usia 13 tahun dan bagi anak laki-laki belum mencapai 15 tahun, maka harus tunduk pada izin wali dengan syarat untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi anak. Hukum Islam memandang bahwa perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan hukum sunnah, wajib atau haram.

Menurut hukum Islam untuk menikah dalam usia dini (hukum sunnah), terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu

1. Kesiapan ilmu untuk berumah tangga;
2. Kesiapan harta atau materi
3. Kesiapan fisik atau kesehatan.

Perbedaan cara pandang antara CEDAW dengan hukum agama di Iran adalah ketentuan hukum yang mengusung kebebasan bagi masyarakat. Dalam ketentuan hukum CEDAW bersifat sekuler yang terdapat pemisahan antara hukum dan agama, sedangkan hukum di Iran mengusung kebebasan dan hanya dibatasi dengan nilai, dan norma agama sehingga terdapat internalisasi nilai-nilai spiritual dan hukumnya (tidak terdapat pemisahan antara agama dengan hukum).

Republik Islam Iran dan CEDAW

Ketidaksesuaian Rezim Iran dengan prinsip-prinsip dan pasal-pasal yang tercantum dalam Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, dan menunjukkan bahwa penolakan rezim untuk bergabung dengan CEDAW bukanlah isu budaya, melainkan secara legal dan politis berkaitan dengan kepentingan keamanan rezim yang tidak demokratis dan diktator. Hasil dari evaluasi oleh para ahli Kementerian Luar Negeri Iran, salah satu alasan Iran tidak meratifikasi CEDAW karena CEDAW bertentangan dengan hukum negara Republik Islam Iran yang menggunakan hukum Islam. Peninjauan kembali yang dilakukan pada tahun 1997 oleh Dewan Tertinggi Revolusi Kebudayaan, CEDAW bertentangan dengan hukum Syariah dalam 40 kasus dan bertentangan dengan hukum nasional dalam 70 kasus. Oleh karena itu, Dewan Tertinggi Revolusi Kebudayaan Iran, menolak konvensi tersebut dan proposal untuk bergabung. Upaya yang dilakukan oleh PBB untuk mengajak Republik Islam Iran bergabung dalam meratifikasi CEDAW masih dilakukan dengan berjanji untuk menindaklanjuti pertentangan hukum Islam dengan CEDAW (NCR, 2016).

Pada tanggal 19 Desember 2001, pemerintah Republik Islam Iran meratifikasi undang-undang yang mengizinkan Iran untuk bergabung dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan dua syarat yaitu; bahwa Republik Islam Iran hanya mengimplementasikan pasal-pasal yang tidak bertentangan dengan Islam dan tidak memaksa Republik Islam Iran untuk berkewajiban dalam mengimplementasikan ayat 1 Pasal 29 tentang arbitrase atas kasus-kasus perbedaan.

Republik Islam Iran mengindikasikan bahwa banyaknya pertentangan antara hukum Syariah dan Konstitusi dalam banyak hal sehingga membuat Republik Islam Iran keberatan untuk meratifikasi CEDAW sesuai dengan ayat 2 pasal 28 CEDAW. Republik Islam Iran juga tidak mempercayai bahwa CEDAW akan berhasil untuk mengurangi aktivitas diskriminasi secara internasional dan tidak sesuai dengan tujuan awal Konvensi, sehingga akan menimbulkan pandangan masyarakat Internasional untuk anti Islam. Para ahli dan ideologi rezim Republik Islam Iran berpendapat bahwa CEDAW dianggap sebagai upaya Barat untuk mengglobalkan budayanya dan bahwa standar hak asasi manusia dan hak-hak perempuan dari Barat tidak dapat diterima dan diterapkan dalam Dunia Islam. Kehadiran CEDAW justru tidak akan mengurangi tekanan apapun dan hanya akan menimbulkan kecaman internasional.

Hal yang menjadi pertimbangan Iran untuk mengadopsi dan bergabung dengan CEDAW dapat menyebabkan melemahnya dan adanya pembatasan hukum Islam dalam penerapannya. Dalam CEDAW, istilah penggunaan kesetaraan dan persamaan hak telah diulang lebih dari 70 kali dalam 30 Pasal Konvensi. Instrumen yang terkandung dalam pasal-pasal Konvensi sangat bertentangan dengan Hukum Islam, dan mewajibkan rezim untuk dapat mengadopsi undang-undang yang diperlukan untuk melindungi hak-hak perempuan.

Dalam penelitian ini setelah melihat hubungan Republik Islam Iran dengan gerakan NGO dan upaya dalam menangani pemenuhan HAM perempuan di Iran melalui CEDAW,

yang menjadi alasan utama Iran belum meratifikasi CEDAW dikarenakan bertentangan dengan konstitusi negara dan Hukum Syariah. CEDAW juga bertentangan dengan kemakmuran kolektif dan relativisme budaya Iran. Meskipun demikian, gerakan sipil perempuan Iran berterima kasih pada CEDAW karena telah memberikan gambaran umum kepada para Feminis di Iran mengenai hak-hak dasar mereka sebagai gender yang setara dengan laki-laki meskipun Republik Islam Iran belum meratifikasinya.

Akan menjadi hal yang sulit bagi Republik Islam Iran apabila meratifikasi CEDAW, karena harus melaporkan kepada komite CEDAW setiap empat tahun tentang langkah-langkah yang diambil dalam mengimplementasikan konvensi tersebut. Hal ini justru akan menjadi bumerang bagi Iran apabila tidak melaporkan dan akan dikecam oleh komunitas internasional. Ketidaksesuaian CEDAW dengan Hukum yang berlaku di Iran dapat menimbulkan situasi yang lebih buruk apabila Republik Islam Iran meratifikasinya. Para pemimpin dan pejabat rezim percaya bahwa akses ratifikasi ke CEDAW dapat mempermalukan rezim dan akan mendistorsi dan merusak kekuatan dan citra Republik Islam Iran di benak negara-negara Muslim lain yang ingin dipengaruhi. Kekhawatiran lainnya adalah apabila ratifikasi CEDAW terjadi akan menyebabkan adanya pemisahan agama dan rakyat dari pemerintah dan menyebabkan ketidakstabilan pemerintah yang akan membuat Iran lengah sehingga politik barat semakin mudah masuk.

KESIMPULAN

Dalam penulisan Jurnal yang berjudul “Dari Swiss ke Iran: Dalam Upaya Mendukung Gerakan Sosial Pemenuhan HAM Bagi Perempuan Iran Melalui Non Government Organisation” dapat disimpulkan bahwa keberadaan perempuan merupakan isu yang sangat hangat untuk dibawa dalam ruang politik, sosial, budaya, agama, pendidikan hingga berbusana di Iran. Kedudukan perempuan Iran mulai menjadi sorotan dunia global karena banyak ditemukan seruan terhadap pihak yang melakukan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Hal ini dilatarbelakangi oleh hukum Islam yang berlaku di Iran hingga saat ini.

Swiss merupakan salah satu negara yang sangat berkomitmen dalam perlindungan universal hak asasi manusia dan menetapkan tindakan yang konkret untuk memperkuat keefektifan dan koherensi Swiss dalam mempromosikan hak asasi manusia di luar negeri. Swiss sebagai negara independen berjejaring global, hak asasi manusia secara konsisten diperhitungkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Swiss menjadi negara yang ikut kontribusi terhadap Iran dalam upaya memenuhi Hak Asasi Manusia bagi perempuan Iran melalui komunitas perempuan, *Non Government Organization* ataupun *Non Profit Organization*. Kehadiran NGO Swiss dilakukan dengan menyalurkan bantuan melalui aktivis perdamaian, pendidikan, fashion hingga mempengaruhi hukum yang berlaku. Adanya peran yang dilakukan oleh Komunitas Perempuan Swiss terhadap Perempuan Iran, memperlihatkan bahwa Swiss hingga saat ini masih menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan Iran.

Kehadiran Swiss di Iran selama kurang lebih 40 tahun dalam berdiplomasi dan berupaya membantu pemenuhan HAM bagi perempuan Iran selalu dibatasi dengan kebijakan para pemimpin Iran, para ulama-ulama dan hukum Islam. Kehadiran NGO (*Non-Government Organisation*) di Iran terdiri dari LSM yang bersifat formal dan informal. Hadirnya LSM/NGO tidak boleh terlibat dalam segala bentuk aktivitas sosial atau politik yang menantang, atau dapat ditafsirkan menentang kebijakan negara. Kebijakan dalam perlindungan HAM yang dilakukan oleh presiden Iran seluruhnya tidak jauh berbeda. Mereka membuat kasus pemenuhan HAM bagi perempuan adalah bahan dasar untuk kampanye dan janji yang dapat diterapkan meskipun pada kenyataannya dalam memimpin masih memberlakukan pembatasan bagi perempuan Iran.

CEDAW sebagai instrumen hukum internasional yang dianggap mampu menangani perilaku diskriminasi di setiap negara, namun tidak bagi Republik Islam Iran. Kepentingan politik negara merupakan *status quo* setiap negara dan tidak bergabung dengan konvensi. Iran menyadari bahwa apabila meratifikasi CEDAW dapat menempatkan Iran dalam keterbatasan dan justru akan melemahkan hukum Islam yang telah ada pada masa kepemimpinan Rezim. Dengan tidak bergabung dengan CEDAW tidak dapat memerlukan komitmen hukum apapun terhadap Republik Islam Iran.

SARAN

Penulisan Jurnal yang berjudul “Dari Swiss ke Iran: Dalam Upaya Mendukung Gerakan Sosial Pemenuhan HAM Bagi Perempuan Iran Melalui Non Government Organisation”, peneliti menyampaikan beberapa hal bahwa penelitian ini hanya meneliti gerakan perempuan Iran yang berupaya dalam mendapatkan pemenuhan HAM dan dukungan Swiss kepada perempuan Iran melalui *Non Government Organisation*.

Peneliti juga menuliskan sikap dan respon dari kebijakan pemerintah Iran terhadap pemenuhan HAM perempuan Iran setelah Revolusi Iran. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian yang sama terkait perjuangan perempuan Iran, dapat memperluas bahasan yang belum bisa dilakukan. Karena peneliti belum mampu meneliti apa yang membuat Iran bertahan membatasi pergerakan perempuan dan apa yang akan terjadi apabila aksi protes besar-besaran yang dilakukan oleh perempuan Iran dapat menjadi kekuatan bagi pemerintah Iran atau justru sebagai bumerang terhadap kebijakan yang diciptakan.

Perjuangan yang dilakukan oleh perempuan untuk mempromosikan hak-hak perempuan Iran sangat sulit dilakukan dan berbeda dengan negara lain. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa masih hukum Islam belum mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman saat ini sehingga, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada para pembaca agar dapat mengambil manfaat dan pembelajaran yang berharga setelah membaca tulisan ini.

UCAPAN TERIMAKASIH.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Dr. Dra. Reni Windiani, M.S., selaku dosen pembimbing 1, Ibu Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D selaku dosen pembimbing 2, dan Bapak Dr. Drs. Muhammad Adnan, M.A. selaku dosen penguji yang telah membimbing penulis sehingga jurnal penelitian ini bisadiselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Abd, Kadir. (2015). Syiah dan Politik: Studi Republik Islam Iran. *Jurnal Politik Profetik*,
- Afkhami, Mahnaz dan Friedl, Erika. (1994). *In the Eye of the Storm: omen inPorevolutionary Iran, Great Britain: Syracuse University Press.*
- Aghajanian, Akbir. (1986). "Some Notes on Divorce in Iran". *Journal of Marriage and the Family* No.48
- Amim, Camron Michael. (2022). *The Making of the Modern Iranian Woman: Gender, State, Policy, and popular Culture, 1865-1964, USA : University Press of Florida*
- Arjmand, Arjmand. (2017). *Public Urban Space, Gender and Segregation: Women Only Urban Parks in Iran.* New York: Routledge.
- BĀMDĀD, MAHDĪ. (1973). Baamdadd Mahdy. *Encyclopedia Iranica.*
- Budiardjo, Miriam. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Esposito, John L and John O.Voll. (1996). *Islam and Democracy.* New York: Oxford University Press.
- Hamideh Sedghi, "FEMINIST MOVEMENTS iii. IN THE PAHLAVI PERIOD," *Encyclopaedia Iranica*, IX/5, pp. 492-498,
- Hamideh, Sedghi. (2007). *Women and Politics In Iran, Veiling, Unveiling, And Revealing,* New York: Cambridge University Press
- Haris, Syamsuddin. (1995). *Demokrasi di Indonesia.* Jakarta: LP3ES.
- Hoodfar, Homa. (2008). "Against All Odds: The Building of A Women's Movement in the Islamic Republic of Iran" dan AWID Women's Rights; Association For Women's Rights in Development, Toronto: AWID
- Ira M. Lapidus. (2000). *Sejarah Sosial Ummat Islam bagian 3.* Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kelly, Sanja. (2010). *Hard-Won Progress and a Long Road Ahead: Women's Rights in the Middle East and North Africa.* New York: Freedom House.
- Lapidus, Ira.M. (2000). *Sejarah Sosial Ummat Islam.* PT.RajaGrafindo Persada.
- Monghissi, Haideh. (1994). *Populism and Feminism in Iran: Woman's Struggle in a Male Define Revolutionary Movement, Great Britain: The Macmillan Press LTC*

- Montclair State University Department of Economics and Finance. (1993). *Theocracy, Human Rights and Women: The Iranian Experience: Proceedings of a One-day Conference*, Upper Montclair, NY: Montclair State University
- Nasir, Tamara. (1980). *Revolusi Iran*. Jakarta: Sinar Harapan
- Parvin, Paidar. (1995). *Women and The Political Process in Twentieth-Century Iran*. Cambridge Syndicate of the University of Cambridge.
- Poupak, Tafreshi. (2010). The Struggle for Freedom, Justice and Equality: The history of the journey of Iranian women in the last century. *All Theses and Dissertations (ETDs)*
- Sadat, Heshmat. (2013). *Participation of Women in Iran's Polity*, GEMC, no.4, vol.2,
- Saeidi, A. (2005). *The Relationship between the Government and Women's NGOs in Iran Search for an Optimum Collaboration*. Women's Studies.
- Shaditalab, Jaleh. (2005). *Iranian Women: Rising Expectations, Critique: Critical Middle Eastern Studies*, vol. 14, issue 1 Volume 5, No.1.
- Weddyono, Sri Wijayanti. (2014). *Hak Asasi perempuan dan CEDAW*. Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat: Jakarta.

Website/Internet

- Antony J. Blinken, Designations in Connection with Human Rights Abuses in Iran. Retrieved February 5, 2023. <https://www.state.gov/designations-in-connection-with-human-rights-abuses-in-iran/>.
- Bakhash, Shaul. (2021). Retrieved January 20, 2023. Reza Shah: Development Without Democracy, Iran Source. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/reza-shah-development-without-democracy/>.
- BBC. (2019). Retrieved 2 Februari 2023. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47032829>
- Farda, Radio. (2022). Retrieved February 2, 2023. Iranian President Signs Decree Further Restricting How Women Can Dress. <https://www.rferl.org/a/iran-women-dress-restrictions-raisi/31989759.html>.
- Fassihi, Farnaz. (2020). Retrieved February 9, 2023. Daughter Is Beheaded, and Iran Asks if Women Have a Right to Safety. <https://www.nytimes.com/2020/06/07/world/middleeast/honor-killing-iran-women.html>
- Georgy, Michael and Tom Perry. (2022). Retrieved February 2, 2023. Analysis : Iran crackdown may burnish Raisi's credentials for top job. Dalam

<https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-crackdown-may-burnish-raisis-credentials-top-job-2022-10-25/>.

Hartnett, Lynne Ann and Villanova University. (2022). Retrieved January 20, 2023. Iran's Revolution: Influenced by Reza Shah's Reforms?.

<https://www.wondriumdaily.com/irans-revolution-influenced-by-reza-shahs-reforms/>

International, Iran. (2023). Retrieved February 11, 2023. President Raisi Claims Women Are Free In Iran. *<https://www.iranintl.com/en/202302119656>*

Iranian Women-before and after the Islamic Revolution. Retrieved February 2, 2023.

<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47032829>

Parsa, Fariba. (2021). Retrieved January 23, 2023. After eight years as Iran's president, what is Rounani's record on women's rights?, The Middle East institute (MEI).

<https://www.mei.edu/publications/after-eight-years-irans-president-what-rouhanis-record-womens-rights>.

Peterson, Scott. (2020). Retrieved February 9, 2023. How outrage over killing of Iranian girl is helping women's rights *[https://www.csmonitor.com/World/Middle-](https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2020/0623/How-outrage-over-killing-of-Iranian-girl-is-helping-women-s-rights)*

[East/2020/0623/How-outrage-over-killing-of-Iranian-girl-is-helping-women-s-rights](https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2020/0623/How-outrage-over-killing-of-Iranian-girl-is-helping-women-s-rights).

Stimson. (2009). Retrieved 31 Januari 2023. Iran International Politics and Dynamics.

Dalam *[https://www.stimson.org/event/iran-internal-social-and-political-dynamics/](https://www.stimson.org/event/iran-internal-social-and-political-dynamics/Why-the-Iranian-regime-does-not-join-the-CEDAW?)*
Why the Iranian regime does not join the CEDAW?. NCRI: Women Committee.

<https://women.ncr-iran.org/2016/03/05/why-the-iranian-regime-does-not-join-the-cedaw/#:~:text=The%20Iranian%20regime%20does%20not%20condemn%20discrimination%20against%20women%20and,of%20all%20discriminations%20against%20women>.